



**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TA 2023**

**BADAN KESBANGPOL KAB. SOLOK**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia yang tak terhingga, sehingga dapat tersusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Tahun 2023 yang merupakan pendoman dan acuan kerja dalam melaksanakan Kegiatan yang akan datang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok merupakan salah satu unsur penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik . Rencana Kerja ini memuat Visi, Misi, Tugas Pokok, Fungsi, Tujuan dan Sasaran yang diharapkan akan dicapai satu tahun kedepan yang secara sistematis dan berkesinambungan.

Didalam menyusun Rencana Kerja kami mendapatkan saran, bimbingan dari berbagai pihak kami ucapkan terimakasih atas bantuan serta sumbang saran yang telah diberikan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Tahun 2023. Untuk kesempurnaan Rencana Kerja ini kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak.

Demikianlah Rencana Kerja ini kami susun semoga bermanfaat untuk kita semua.

Arosuka,      September 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK**

  
**AGUS ROSTAMDA, SH,MM**  
**NIP 19650805 199308 1 001**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
<b>BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN</b>	
<b>          LALU.....</b>	<b>8</b>
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT	
DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA	
PERANGKAT DAERAH.....	8
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT	
DAERAH.....	14
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN	
FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	15
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	15
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
MASYARAKAT.....	20
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>21</b>
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	21
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	23
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT</b>	
<b>          DAERAH.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB V    PENUTUP.....</b>	<b>41</b>

## DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022.....	9
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Solok.....	14
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Badan Kesbangpol Kabupaten Solok.....	17
3.1	Permasalahan Pelayanan Badan Kesbangpol Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Nasional.....	22
3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Kesbangpol Kabupaten Solok.....	28
4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Tahun 2023.....	32



## **DAFTAR GAMBAR**

1.1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD.....	2
1.2	Hubungan Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	4

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

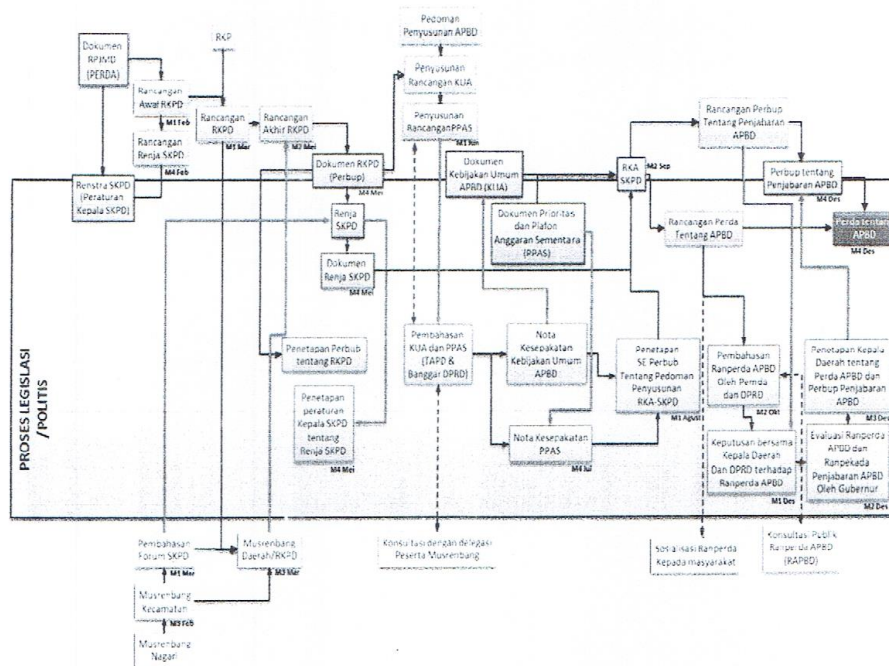
#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan suatu dokumen rencana resmi berupa perencanaan program jangka pendek selama 1 (satu) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan strategi, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian kualitas penyusunan Renja SKPD akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat.

Penyusunan Renja dilakukan melalui penyiapan penyusunan Renja berdasarkan hasil review Renja Tahun lalu yang telah dilaksanakan dan penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Rancangan Renja SKPD disinkronisasikan dengan Kebijakan Nasional dan Propinsi serta hasil Musrenbang Kecamatan. Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD ini selanjutnya dibahas pada Forum SKPD Kabupaten/Kota. Sebelum dilakukan penetapan, Renja SKPD disesuaikan kembali dengan RKPD Kab./Kota. Jika hasil verifikasi Rancangan Renja SKPD yang telah dilakukan sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota, maka akan dilakukan pengesahan untuk ditetapkan menjadi Renja SKPD. Untuk lebih jelasnya, alur atau proses penyusunan rancangan Renja SKPD dan penetapan Renja SKPD dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

**Gambar 1.1**  
**PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD**



Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah bersifat prediktif dan memuat hal-hal yang fundamental dan krusial yang terdiri dari Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dalam jangka 20 (Dua puluh) Tahun.

RPJP Daerah Tahun 2006-2025 Kabupaten Solok ini berkaitan dengan RPJM dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) diharapkan keserasian dengan rencana penggunaan dan RPJM agar perencanaan ini terimplementasi secara berkesinambungan.

Ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Kerja



Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) merupakan pedoman perencanaan SKPD untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD secara rinci. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan yang telah ditetapkan sebagai Dokumen Rencana Tahunan SKPD.

Keterkaitan Renja dengan Rencana Strategis (Renstra) dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan SKPD untuk memasukan Program Kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai penjabaran dari RPJMD dan Renstra SKPD, proses penyusunan Rencana Kerja SKPD harus berpedoman kepada kedua document tersebut guna terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan masing-masing SKPD untuk menunjang capaian kinerja daerah sebagai mana termasuk didalam indikator kinerja pada RPJMD.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

[illegible]

Rencana Kerja Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006–2025, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja Badan Kesbangpol yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Solok yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok.

#### **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman kerja bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok dalam melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan pada Tahun 2023 yang memuat :

- a. Acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Tahun 2023.
- b. Dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023.
- c. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Tahun 2023.
- d. Pedoman dalam Penyusunan RAPBD 2023.

Adapun maksud dan tujuan pembuatan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok yaitu, sebagai pedoman dalam pelaksanaan prioritas rencana program selama kurun waktu 1 (satu) tahun melalui sumber pembiayaan APBD dan APBN (DAK). Penyusunan Renja ini mengacu kepada Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 yang mengarah pada 6 (enam) program sasaran prioritas.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok kini disusun secara sistematis, terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu:

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

2.2 Landasan Hukum

3.3 Maksud dan Tujuan

4.4 Sistematika Penulisan

**BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU**

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu

2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD

**BAB 3 : TUJUAN DAN SASARANG PERANGKAT DAERAH**

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

**BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB 5 : PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan Realisasi APBD Tahun 2021. Hasil evaluasi ini memuat realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi, telah memenuhi dan melebihi hasil/keluaran yang direncanakan serta faktor penyebabnya. Badan Kesbangpol melaksanakan satu urusan penunjang yaitu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan urusan tersebut kesbangpol di dukung oleh 6 Program.

Dalam penetapan Rencana Kerja tahun 2023, kita meriview pencapaian target Rencana Kerja tahun 2021 dan perkiraan target Rencana Kerja tahun 2022 ini. Hal ini dapat menjadi patokan pelaksanaan rencana kerja kedepannya dalam pencapaian target program dan kegiatan yang ada kedepannya.

Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Tahun 2021 dapat dijadikan Tolak ukur dalam menentukan dan melaksanakan Renja tahun lalu.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2021 disampaikan pada table 2.1 :



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**  
**Badan Kesbangpol Kabupaten Solok**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 dengan tahun 2021-	Target dan Realisasi kinerja Program Dan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{7}{6} \times 100$	9	$10 = \frac{9}{8} \times 10$	$11 = \frac{10}{4} \times 100$
8.01	<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		<b>5.001.164.500</b>		<b>3.417.852.121</b>	<b>3.027.423.945</b>	<b>88.58</b>	<b>2.928.469.858</b>	<b>1.175.135.980</b>	<b>40.13</b>
8.01. 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemerintahan layanan Kesejahteraan</b>	<b>1.791.307.600</b>		<b>1.670.960.412</b>	<b>1.474.580.575</b>	<b>88.25</b>	<b>1.453.291.199</b>	<b>895.643.230</b>	<b>61.63</b>
8.01. 01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koori penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	90.000.000		64.875.300	56.648.200	87.32	64.823.100	40.425.100	62.36
8.01. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemerintahan administrasi keuangan perangkat daerah	1.215.000.000		1.098.834.348	960.672.575	87.43	1.016.170.753	597.678.330	58.82

8.01. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	310.000.000		259.748.875	237.766.600	91.54	209.801.500	150.173.500	71.58
8.01. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	9.300.000		2.300.000	2.300.000	100.00	7.097.446	500.000	7.04
9.01. 01.2. 09	Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	167.007.600		245.201.889	217.193.200	88.58	155.398.400	106.866.300	68.77
<b>8.01. 02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>534.700.000</b>		<b>1.409.669.209</b>	<b>1.289.663.750</b>	<b>91.49</b>	<b>22.470.000</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
8.01. 02.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	534.700.000		1.409.669.209	1.289.663.750	91.49	22.470.000	-	0.00
<b>8.01. 03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN</b>	<b>Persentase Koordinasi Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan</b>	<b>1.361.993.400</b>		<b>1.409.669.209</b>	<b>1.289.663.750</b>	<b>91.49</b>	<b>1.096.271.859</b>	<b>42.365.100</b>	<b>3.86</b>



	<b>LEMBAGA MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>								
8.01. 03.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Koordinasi Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.361.993.400	1.409.669.209	1.289.663.750	91.49	1.096.271.859	42.365.100	3.86	
<b>8.01. 04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Ormas/LSM Aktif</b>	<b>215.000.000</b>				<b>95.762.900</b>	<b>52.767.800</b>	<b>55.10</b>	
8.01. 04.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM Aktif	215.000.000				95.762.900	52.767.800	55.10	
<b>8.01.</b>	<b>PEMBINAAN DAN</b>	<b>Persentase Koordinasi</b>	<b>175.000.000</b>				<b>64.511.000</b>	<b>63.331.000</b>	<b>98.17</b>	





Dari Tabel 2.1 diketahui tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 terhadap Renstra Badan Kesbangpol tahun 2021-2026 adalah sebesar 88.58 dengan uraian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 5) Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sejauh mana keberhasilan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau sejauh mana kinerja Badan Kesbangpol berdasarkan target di Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 terlampir.

**TABEL 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Badan Kesbangpol Kabupaten Solok**

No	Indikator	SPM/S tandar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja			67,00	69,00	70,00	75,00	67,00	69,00	70,00	75,00	
2.	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan			100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat			3,40	3,45	3,51	3,55	3,40	3,45	3,51	3,55	
4.	Persentase koordinasi penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan			0	100	100	100	0	100	100	100	
5.	Persentase koordinasi peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik			100	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Ormas/LSM aktif			47,5	48,67	49,84	51,01	47,5	48,67	49,84	51,01	
7.	Persentase koordinasi pembinaan dan pengembangan ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya			100	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase penanganan konflik sosial			100	100	100	100	100	100	100	100	



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

- a. Perselisihan antar nagari dan Kabupaten menyangkut tapal batas yang berdampak pada perpecahan antar masyarakat nagari perlu diantisipasi sedini mungkin dan ditangani secara arif oleh daerah.
- b. Adanya aliran kepercayaan terlarang yang masih bergerak secara diam-diam ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
- c. Organisasi sosial kemasyarakatan yang ada perlu terdata dan terpantau secara lengkap agar organisasi tersebut terbina dengan baik sehingga dapat menjadi organisasi yang menjadi partner pemerintah.
- d. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu modal dasar dalam suksesnya pembangunan
- e. Rendahnya pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa
- f. Tingginya tingkat terjadinya konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Solok
- g. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pesta demokrasi
- h. Adanya ketidakstabilan harga bahan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat memicu konflik di tengah tengah masyarakat
- i. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya Narkoba

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sesuai dengan amanat Undang-undang yang mengatur tentang perencanaan, bahwa setiap Pemerintah Kabupaten/kota wajib menyusun rancangan RKPD yang berisikan rencana pembangunan Pemerintah Daerah dan juga memuat isu-isu strategis yang ada baik itu dari kementerian maupun dari Pemerintah Provinsi. Untuk menghasilkan perencanaan yang komprehensif dan representative, diperlukan analisa perencanaan pembangunan yang berbasis kepada tingkat keutuhan daerah. Sehingga dengan adanya proses perbandingan ini, pada akhirnya dapat dilihat apakah RKPD yang telah bisa mencerminkan kebutuhan pembangunan. Reviu terhadap rancangan akhir RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada table 2.4 hasil reviu menunjukan bahwa rancangan akhir RKPD telah mengakomodir kebutuhan Program dan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2023.

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Badan Kesbangpol Kabupaten Solok**

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan Keskretariatian	100 %	1.534.307.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan Keskretariatian	100 %	1.534.307.600	
	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan capaian kinerja dan iktislar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan iktislar realisasi kinerja SKPD	8 Dokumen	75.000.000	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan capaian kinerja dan iktislar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan iktislar realisasi kinerja SKPD	8 Dokumen	75.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1.050.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1.050.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi perangkat daerah	100%	241.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi perangkat daerah	100%	241.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	7.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	7.800.000	



	Pemeliharaan barang milik ddaerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	160.007.600			Persentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	160.007.600		
II	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<b>Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b> Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	22.470.000	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<b>Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b> Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<b>Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b> Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	22.470.000		
II I	<b>PROGRAM PENGINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	<b>Persentase Koordinasi Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b> Persentase Koordinasi Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	100%	1.331.993.400	<b>PROGRAM PENGINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	<b>Persentase Koordinasi Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b> Persentase Koordinasi Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	<b>Persentase Koordinasi Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan</b> Persentase Koordinasi Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	100%	1.331.993.400		



Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Ormas/LSM Aktif</b>	<b>49,84%</b>	<b>155.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Ormas/LSM Aktif</b>	<b>49,84%</b>	<b>155.000.000</b>
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM Aktif	49,84%	155.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM Aktif	49,84%	155.000.000
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>135.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>135.000.000</b>

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	135.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	135.000.000
<b>V I</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>713.163.500</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>713.163.500</b>
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	713.163.500	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	713.163.500

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sistem perencanaan pembangunan nasional diimplementasikan melalui pendekatan aspiratif, politis, teknokratis dan perencanaan gabungan top down dan bottom up dilakukan untuk menyaring aspirasi masyarakat dalam pembangunan melalui Musrenbang yang dilaksanakan dari tingkat Nagari kemudian dilanjutkan dengan tingkat Kecamatan, forum OPD dan terakhir di Musrenbang Kabupaten. Pada akhirnya, kegiatan ini menghasilkan usulan program dan kegiatan yang nantinya akan ditampung oleh OPD terkait. Usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2022 pada umumnya bersifat pembangunan fisik yang telah diakomodirkan oleh dinas-dinas teknis, seperti : DPUPR, DPRKPP, Disdikpora, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan Disperbud.



### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum) dan sasaran Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Periode 2020-2024, visi Kementerian Dalam Negeri adalah **Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri**". Sedangkan misi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri untuk mencapai visi tersebut adalah

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga keBinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinm

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri mendukung misi 1 dari 3 misi yang ditetapkan dalam Renstra Kemendagri yaitu **memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga keBinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri**.

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Kementerian Dalam Negeri menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ditetapkan untuk mendukung misi 1 adalah **"Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa"**. Adapun sasaran untuk mendukung misi 1 (menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) adalah :

1. Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator kinerja sasaran meliputi :
  - a. Indeks Demokrasi Indonesia
  - b. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dan Pemilu
  - c. Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator kinerja sasaran meliputi :
  - a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
  - b. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
  - c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
  - d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
3. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditinjau dari sasaran jangka menengah Kementerian Dalam negeri dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan Pelayanan Badan Kesbangpol**  
**Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Nasional**

No	Sasaran Jangka Menengah Kemendagri	Permasalahan Pelayanan Kesbangpol	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Belum optimalnya Penanganan Konflik Sosial yang Mampu Melaksanakan secara Optimal Deteksi Dini dan Cegah Dini Serta Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	1. Masih kurangnya pembinaan 2. Masih kurangnya Anggaran Kegiatan 3. Kurangnya personil	1. Komunikasi yang lancar antara Pusat dan Daerah serta peningkatan Sumber Daya Manusia 2. Penyesuaian Anggaran dengan Kegiatan

Adapun sasaran yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani



### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renja didasarkan atas rumusan tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah serta rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Solok. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi merupakan kondisi yang memberikan dampak yang signifikan dimasa depan. Isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Kabupaten Solok sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
  - Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
1. Meningkatnya kualitas pelayanan public
  - Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila
  - Meningkatnya koordinasi dengan Instansi terkait dan Partai Politik serta lembaga lainnya'

### 3.3. Program dan Kegiatan

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

##### Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

##### Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

##### Sub Kegiatan :



- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Fasilitas Kunjungan Tamu
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor
- 6) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan.
  - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi

**2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

**Kegiatan :**

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

**Sub Kegiatan :**

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

- c. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- d. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

**3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

**Kegiatan :**

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

**Sub Kegiatan :**

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

**4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

**Kegiatan :**

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- b. Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

**5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

**Kegiatan :**

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

**Sub Kegiatan :**

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

**6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

**Kegiatan :**

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

**Sub Kegiatan :**



- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Badan Kesbangpol Kabupaten Solok**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.01	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2.855.411.810	DAU			6.184.806.433
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan pelayanan Kesekretariatan		100%	1.532.883.351	DAU		100%	1.632.056.533
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		8 Dokumen	65.000.000	DAU		8 Dokumen	75.000.000
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		8 Laporan	65.000.000	DAU		8 Laporan	65.000.000

8.01.01.2.02	Admiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		<b>Persentase penernuhan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.037.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>1.095.056.533</b>	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	982.000.000	DAU		10 Orang/bulan	1.030.056.533	
8.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	5 Dokumen	45.000.000	DAU		5 Dokumen	50.000.000	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Laporan	10.000.000	DAU		5 Laporan	15.000.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>260.785.905</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>272.000.000</b>	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.000.000	DAU		3 Paket	4.000.000	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	40.000.000	DAU		3 Paket	42.000.000	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	25.000.000	DAU		6 Paket	26.000.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	12 Paket	25.000.000	DAU		12 Paket	27.000.000	



8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	60.000.000	DAU		12 Laporan	63.000.000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	107.785.905	DAU		12 Laporan	110.000.000
8.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>		<b>100%</b>	<b>7.097.446</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	500.000	DAU		1 Laporan	2.000.000
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	4.797.446	DAU		12 Laporan	9.000.000
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.800.000	DAU		12 Laporan	4.000.000
9.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>		<b>100%</b>	<b>163.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>175.000.000</b>

8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	135.000.000	DAU		6 Unit	142.000.000
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	6 Unit	28.000.000	DAU		6 Unit	33.000.000
8.01.02	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>
8.01.02.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	500.000	DAU		500 Orang	250.000.000
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,	0 Orang	500.000	DAU		12 Orang	250.000.000

	Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
8.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase Koordinasi Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	100%	1.012.028.459	DAU	100%	2.390.000.000		
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<b>Persentase Koordinasi Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	100%	1.012.028.459	DAU	100%	2.390.000.000		
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	1 Dokumen	1.000.000	DAU	1 Dokumen	15.000.000		



	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun						
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1.000.000	DAU	12 Dokumen	600.000.000	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	1.009.028.459	DAU	50 Orang	1.250.000.000	

8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Orang	500.000	DAU	400 Orang	175.000.000
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Laporan	500.000	DAU	12 Laporan	350.000.000
8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Ormas/LSM Aktif</b>	<b>49.84%</b>	<b>133.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>51.01%</b>	<b>332.749.900</b>

8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM Aktif	49.84%	133.000.000	DAU	51.01%	332.749.900
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	83.000.000	DAU	50 Orang	82.749.900
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 Laporan	50.000.000	DAU	10 Laporan	50.000.000
8.01.04.2.01.01	Penyusunan program kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen program kerja Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	4 Dokumen	200.000.000



8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	100%	1.000.000	DAU	100%	450.000.000
8.01.05.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	100%	1.000.000	DAU	100%	450.000.000
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Orang	500.000	DAU	150 Orang	150.000.000
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Orang	500.000	DAU	600 Orang	300.000.000

8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	di Daerah								
		<b>Persentase Penanganan Konflik Sosial</b>								
			100%	175.500.000	DAU				100%	880.000.000
8.01.06.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase Penanganan Konflik Sosial</b>	100%	175.500.000	DAU				100%	880.000.000
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1.000.000	DAU				1 Dokumen	15.000.000
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga	0 Dokumen	500.000	DAU				5 Dokumen	30.000.000

	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun						
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang	500.000	DAU	150 Orang	100.000.000	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	98.000.000	DAU	50 Orang	300.000.000	



8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Penantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 Laporan	75.000.000	DAU	12 Laporan	300.000.000
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	500.000	DAU	12 Dokumen	300.000.000

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

#### BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah memuat program yang akan dilaksanakan serta pagu indikatif yang diperlukan untuk pencapaiannya. Rencana kerja dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Tahun 2023 dapat dilihat pada table 4.1 berikut.

**Tabel 4.1**

#### **Rencana Kerja dan Pendanaan**

#### **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1.	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100	Rp. 1.532.883.351
2.	Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	Rp. 1.000.000
3.	Persentase Koordinasi Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100	Rp. 1.012.028.459
4.	Persentase Ormas/LSM Aktif	49,84	Rp. 133.000.000
5.	Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	Rp. 1.000.000
6.	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100	Rp. 175.000.000
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 2.855.411.810</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah SKPD merupakan Dokumen Perencanaan yang akan menjadi pedoman bagi Masing-masing SKPD dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk 1 (satu) tahun ke depan. Untuk itu dengan telah disusunnya Renja SKPD ini, diharapkan semua pihak terlibat dalam pengambilan Keputusan Perencanaan Pembangunan berpedoman dan berpijak kepada Renja ini, sehingga arah pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Mengingat akan keterbatasan kemampuan Keuangan Daerah, adakalanya Rencana Kerja yang sudah tertuang ke dalam Renja SKPD tidak dapat direalisasikan. Sehingga hasil Renja SKPD perlu dilakukan evaluasi untuk target capaiannya. Sedangkan untuk kegiatan yang tidak terlaksana bisa dicarikan sumber pendanaan yang lain seperti dari APBD Pusat, APBD Provinsi maupun dari pihak swasta. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang kedalam Renja SKPD, perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat sehingga hasilnya dapat sesuai dengan sasaran. Hal ini bisa dilakukan melalui rapat kerja bulanan sehingga dapat dijadikan sebagai monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tersebut.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesbangpol ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pihak di Lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Solok.

Arosuka, September 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

  
**AGUS ROSTAMDA, SH,MM**  
**NIP 19650805 199308 1 001**